



**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh

CINDY LIVIA NAMIRA

NPM 1615100423

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

2021



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CINDY LIVIA NAMIRA
NPM : 1615100423
PROGRAM STUDI : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DAN SISTEM PELAPORAN
TERHADAP AKUNTANBILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA
MEDAN)

MEDAN, 27 Januari 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Rahima br. Furba, SE., M.Si., Ak., CA)



(Dr. Bambang Widjanarko, SE., M.M)

PEMBIMBING I

(Rahima br. Furba, SE., M.Si., Ak., CA.)

PEMBIMBING II

(Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA
BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : CINDY LIVIA NAMIRA
NPM : 1615100423
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DAN SISTEM PELAPORAN
TERHADAP AKUNTANBILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA
MEDAN)

MEDAN, 27 Januari 2021



(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA III

(Dwi Saraswati, S.Pd., M.Si)

ANGGOTA IV

(Doni Efrizah, SS., M.S)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CINDY LIVIA NAMIRA

NPM : 1615100423

Program Studi : AKUNTANSI

Fakultas : Sosial Sains

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Januari 2021

Yang menyatakan,



(Cindy Livia Namira)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CINDY LIVIA NAMIRA
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 01 Agustus 1999
NPM : 1615100423
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains / AKUNTANSI
Alamat : Gatot Subroto Gg.Famili Lk I No.14F

Dengan ini menyatakan mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan Hal ini Tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian Surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 07 Februari 2021

Yang membuat Pernyataan



Cindy Livia Namira
1615100423



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3609/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: CINDY LIVIA NAMIRA
: 1615100423
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Fakultas : Akuntansi

Sejak terhitung sejak tanggal 09 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku dan tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 09 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RAHIMA Br. PURBA, S.E., M.Si
 Dosen Pembimbing II : PUJA RIZKY R., S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : CINDY LIVIA NAMIRA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100423
 Bidang Pendidikan : STRATA I (SI)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH &
 SISTEM LAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9 Maret '20	Bab I: Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Harus Sinkron.		
9 Mei '20	Bab II : Teori belum ada. Hipotesis & Kerangka di susunikan.		
9 Juli '20.	- Populasi - Sampel - Teknik analisis data.		
9 Juli '20.	Acc Sempro.		

Medan, 20 Juli 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : **SOSIAL SAINS**
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br. Purba, SE. MSi
 Dosen Pembimbing II : Puja Rizky .R. S.E. MSi
 Nama Mahasiswa : CINDY LIVIA NAMIRA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100423
 Bidang Pendidikan : PENGARUH ANGGARAN BERBASIS
 dan Tugas Akhir/Skripsi : KINERJA DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3/2/2020	Konfirmasi judul		
4/5/2020	Revisi Konten		
4/8/2020	Revisi Format		
5/6/2020	ACC Sempurna		

Medan, 12 Agustus 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RAHIMA BR. PURBA. S.E., M.si., AK., CA., ...
 Dosen Pembimbing II :
 Nama Mahasiswa : CINDY LIVIA NAMIRA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100423
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SISTEM PELAPORAN
 TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 (STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
4/1-2021	Perbaiki materi proposal	<i>[Signature]</i>	
4/1-2021	Pembahasan harus kaitan dgn teori dan peneliti t'dahulu.	<i>[Signature]</i>	
4/1-2021	Acc Sidang.	<i>[Signature]</i>	

Medan, 25 Januari 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Puya Rizqy Ramadhan, SE., M.si.
 Dosen Pembimbing II : CINDY LIVIA NAMIRA
 Nama Mahasiswa : Akuntansi
 Jurusan/Program Studi : 1615100423
 Nomor Pokok Mahasiswa : Strata 1
 Bidang Pendidikan : Pengaruh Anggaran berbasis kinerja & sistem
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi
 Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan kota Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1/01/2021	Review Format		
1/01/2021	Review Konten		
1/01/2021	ACC Selesai		

Medan, 27 Januari 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Mengetahui dan menyetujui di bawah ini :



Nama : CINDY LIVIA NAMIRA
 Tempat, Tanggal Lahir : MEDAN / 01 Agustus 1999
 No. Mahasiswa : 1615100423
 Jurusan : Akuntansi
 Bidang : Akuntansi Sektor Publik
 SKS yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.47
 No. Kontak : 089613094087
 Mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Judul : Analisis Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Medan)

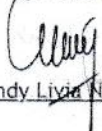
Mengetahui Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Perlu


 Rektor

 (Cahyo Pramono, SE., MM)

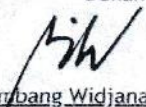
Medan, 30 September 2020

Pemohon,


 (Cindy Livia Namira)

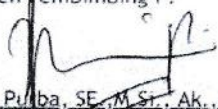
Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan


 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

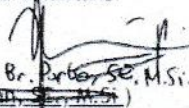
Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :


 (Rahima Br. Purbasari, SE., M.Si., Ak., CA.)

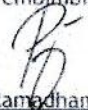
Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi


 (Dr. Rahima Br. Purbasari, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:


 (Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si.)

Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



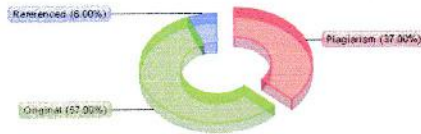
Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1740 - Originality Report 2/2/2021 8:13:33 AM

Applied document: CINDY LIVIA NAMIRA_181202120_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License04
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian



Plagiarism Chart



Plagiarism Colors



Acc Jilid I
27/04/2021



Acc Jilid I
27/4/2021



Puja Rizqy R.

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJADAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh

CINDY LIVIA NAMIRA

NPM 1615100423

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

2021

Acc Sampro
20/7/2020



Acc Sampro
18/8/2020

B.

Buja Cindy R.

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJADAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN)**

PROPOSAL

Oleh

CINDY LIVIA NAMIRA

NPM 1615100423

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2020**

Permohonan Meja Hijau

Medan, 31 Mei 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CINDY LIVIA NAMIRA
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 1 Agustus 1999
 Nama Orang Tua : DZULKIFLI
 NIM : 1615100423
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 089613094087
 Alamat : JL GATOT SUBROTO GG FAMILI LK I NO.14-F

Adapun bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kota Medan)**, Selanjutnya memintakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b) dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dan pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga : **S**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

CINDY LIVIA NAMIRA
 1615100423

Ditatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: CINDY LIVIA NAMIRA

: 1615100423

: MEDAN / 1999-08-01

: JL GATOT SUBROTO GG FAMILI LK I NO.14-F

: 089613094087

: DZULKIFLI/ERLINDAWANI

: SOSIAL SAINS

: Akuntansi

: Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kota Medan)

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Jika ada kesalahan data pada ijazah saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam kesadaran. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 09 Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan



ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui metode kuisioner terhadap 33 responden karyawan pada Dinas Kesehatan Kota Medan dengan menggunakan metode *random sampling* untuk mengetahui tanggapan responden terhadap masing-masing variabel. Kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh berupa analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis lewat uji t dan uji F serta uji analisis koefisien determinasi (R^2). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang berfungsi untuk membuktikan hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil analisis SPSS versi 26 pada penelitian ini, menunjukkan bahwa hasil uji F (simultan) sebesar 21,895 dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan demikian H_3 diterima, yaitu Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan dari Uji t (parsial) diperoleh t hitung dari variabel Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 2,094 dengan nilai sig $0,045 < 0,05$ maka H_1 diterima. Kemudian untuk variabel Sistem Pelaporan diperoleh t hitung sebesar 2,802 dengan nilai sig $0,009 < 0,05$ maka H_2 diterima. Dimana diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 yang berarti besarnya proporsi variabel X_1 , X_2 , terhadap Y sebesar 53,9%, sedangkan sisanya 40,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (2) Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (3) Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

Writing this thesis aims to determine whether there is an influence of the Performance-Based Budgeting and Reporting System on the Performance Accountability of Government Agencies in the Medan City Health Office.

In this study, data collection was carried out through a questionnaire method to 33 employee respondents at the Medan City Health Office using a random sampling method to determine respondents' responses to each variable. Then carried out an analysis of the data obtained in the form of quantitative analysis and qualitative analysis. Quantitative analysis includes validity and reliability tests, classical assumption tests, hypothesis testing through t-test and F-test and analysis of the coefficient of determination (R²). The data analysis technique used is multiple linear regression analysis which serves to prove the research hypothesis. Based on the results of the analysis of SPSS version 26 in this study, it shows that the results of the F test (simultaneous) are 21.895 with a sig value of 0.000 < 0.05, thus H₃ is accepted, namely the Performance-Based Budgeting and Reporting System. Simultaneously, it has a positive and significant effect on Agency Performance Accountability. Government. Meanwhile, from the t test (partial), it is obtained t count of the Performance-Based Budget variable of 2.094 with a sig value of 0.045 < 0.05 so that H₁ is accepted. Then for the Reporting System variable obtained t count of 2.802 with a sig value of 0.009 < 0.05, then H₂ is accepted. Where the coefficient of determination obtained is 0.593 which means the proportion of variables X₁, X₂, to Y is 53.9%, while the remaining 40.7% is influenced by other factors not examined. The results showed that: (1) Performance-based budgeting partially has a positive and significant effect on employee performance. (2) The reporting system partially has a positive and significant effect on employee performance. (3) Performance-Based Budgeting and Reporting System simultaneously has a positive and significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies.

Keywords : Performance Based Budget, Reporting System, Accountability for Performance of Government Agencies

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :“ pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kota Medan)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, SE.,M.M selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Rahima br.Purba,SE.,M.Si.,Ak.,CA Ketua Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Rahima br.Purba,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu dan pikiran secara sabar dan penuh kasih sayang untuk mengarahkan, membimbing, membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Puja Rizqy Ramadhan, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktu dan pikiran secara sabar dan penuh kasih sayang untuk mengarahkan, membimbing, membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Drs.Dzulkifli Nainggolan dan Ibunda Erlindawani S.Pd, serta Abang-Abang saya Mahruf Luth Firja S.P dan Rifky Riandika S.Kom yang telah memberikan dukungan, iringan doa setiap harinya, cinta kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Orang Terbaik saya, Nadya Wulandari, Zalfa Salsabila yang selalu memberikan dukungan semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh teman-teman khususnya stambuk 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan moral dari kalian semua.
9. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini memiliki kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, sangat diperlukan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 27 Januari 2021

Cindy Livia Namira

1615100423

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Keaslian Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	9
2.1.2 Teori Kontigensi (<i>Contigensi Theory</i>).....	10
2.1.3 Defenisi Akuntabilitas Kinerja	11
2.1.4 Defenisi Anggaran Berbasis Kinerja	16
2.1.5 Defenisi Sistem Pelaporan	21
2.2 Peneliti Sebelumnya	22
2.3 Kerangka Konseptual.....	24
2.4 Hipotesis	26
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	29
3.4 Populasi dan Sampel.....	30
3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	37
4.1.2 Gambaran Umum Responden	40
4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian	44
4.1.4 Uji Instrumen Data	48

4.1.5 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.1.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	54
4.1.7 Uji Hipotesis	55
4.2 Pembahasan	59
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68
BIODATA	87

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Tahun 2014-2019.....	3
Tabel 1.2 Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	22
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian.....	27
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel.....	28
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuisioner.....	39
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	39
Tabel 4.3 Umur Responden.....	40
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden.....	40
Tabel 4.5 Masa Kerja Responden.....	41
Tabel 4.6 Jabatan Responden.....	41
Tabel 4.7 Golongan Responden.....	42
Tabel 4.8 Pengalaman Diklat.....	42
Tabel 4.9 Penilaian Responden Terhadap Variabel (X_1).....	43
Tabel 4.10 Penilaian Responden Terhadap Variabel (X_2).....	44
Tabel 4.11 Penilaian Responden Terhadap Variabel (Y).....	46
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas.....	48
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas.....	49
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogrov-Smirnov</i>	50
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	54
Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	55
Tabel 4.18 Hasil Uji Simultan (Uji f).....	57
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	15
Gambar 2.2 Tahapan Siklus Anggaran.....	18
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	38
Gambar 4.2 Histogram	51
Gambar 4.3 Normal P-Plot Uji Normalitas	51
Gambar 4.4 <i>Scatter Plot</i> Uji Heterokedastitas	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan, anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah terlebih dulu harus memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Aspek yang diukur didalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah aspek keuangan yang berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi

atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Selain Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan juga sangat diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer untuk mengimplementasikan anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan dalam mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang diterapkan.

Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya ialah instansi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ialah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Menurut Yusrianti dan Rika (2015), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ialah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau

digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Rahmadan (2014), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban untuk disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah.

Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah. Tuntutan agar terwujudnya pemerintah yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien, professional dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas.

Pemerintah daerah Kota Medan mengalami penurunan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama lima tahun dari hasil pemeriksaan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPH LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Tahun 2014-2019

Tahun	Opini
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : <https://sumut.bpk.go.id/>.

Salah satu peran BPKP di daerah adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator kualitas

akuntabilitas keuangan salah satunya ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan pada tahun 2016 – 2017 ialah Wajar Dengan Pengecualian WDP . Adapun Masalah yang menghambat kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut: Terdapat pengelolaan aset yang belum memadai; - Terbatasnya kemampuan SDM di SKPD dan PPKD dalam ilmu akuntansi sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang banyak dalam proses pendampingan. (<http://www.bpkp.go.id>.)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 41/LHP/XVIII.MDN/04/2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2019. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 ke Pemerintah Kota Medan. Adapun opini yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumut kepada Pemko Medan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 ialah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). penyajian laporan yang dilakukan Pemko Medan sudah standar akuntansi pemerintahan namun masih ada yang harus diperbaiki Pemko Medan, dengan itu BPK RI meminta kepada Pemko Medan segera menindak lanjuti laporan yang telah diberikan. (<https://pemkomedan.go.id>.)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Anggaran berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kota Medan).

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah daerah Kota Medan mengalami penurunan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama lima tahun dari hasil pemeriksaan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Kota Medan masih belum optimal dalam menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan.
3. Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2017 mengalami penurunan opini WDP akibat pengelolaan aset yang belum memadai, terbatasnya kemampuan SDM di SKPD dan PPKD dalam ilmu akuntansi.

Selanjutnya, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, spesifik, sempurna, dan mendalam maka peneliti membatasi masalah tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur / dinilai berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan di Dinas Kesehatan Kota Medan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan?

2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui apakah Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian

ini adalah :

1. Aspek Teoritis (keilmuan), diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi keilmuan untuk penelitian sejenis yang akan datang dan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam menganalisis laporan akuntabilitas instansi pemerintah.
2. Aspek Praktis (guna laksana), diharapkan dengan diadakannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Medan tentang bagaimana seharusnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berjalan dengan efektif sesuai dengan teori yang ada.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian dari Gita Soraya, Rika, Cherrya “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan.

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian
Gita Soraya, Rika, Cherrya (2014)	pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan	Asosiatif	Menggunakan variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan sistem pelaporan sebagai variabel independen

Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kota Medan)”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Wilayah Penelitian :

Penelitian terdahulu di lakukan di Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan, sedangkan wilayah penelitian ini di lakukan di Sumatera Utara, di Dinas Kesehatan Kota Medan .

2. Waktu Penelitian :

Penelitian terdahulu di lakukan pada tahun 2014, sedangkan penelitian ini di lakukan pada tahun 2020.

3. Instansi Penelitian :

Penelitian Terdahulu berada di Instansi pusat, sedangkan penelitian ini berada di Instansi Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Stiglitz (1999) dalam Asmara (2010) menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik publik maupun pribadi. Karena menurut Bergman dan Lane (1990) dalam (Setiawan 2012) kerangka hubungan prinsipial agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen kebijakan publik. Hubungan keagenan di pemerintah melibatkan eksekutif, legislatif dan publik. Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai *expert agent* untuk melaksanakan suatu tindakan. Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau publik karena mereka adalah representasi dari publik yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana publik. Oleh karena itu publik merupakan prinsipal bagi eksekutif dan legislatif (Asmara 2010).

Menurut teori keagenan masyarakat merupakan pihak prinsipal dan pemerintah merupakan agen. Pemerintah dapat saja melakukan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya dan mengorbankan kepentingan masyarakat tetapi dengan adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan tersebut dengan cara masyarakat sebagai prinsipal melakukan monitoring atas apa yang dilakukan oleh agen (Girsang, 2015).

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan yaitu masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan pemerintah sebagai agen dapat mengakibatkan asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak

informasi atau ilmu dalam mengenai pemerintah dan pengelolaan dana misalnya dalam APBN/APBD. Asimetri informasi tersebut akan mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat mengharapkan pemerintah dapat mengakomodasi semua keinginan masyarakat dalam penyelenggaraan publik dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun pemerintah dapat menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Penyalahgunaan yang dapat dilakukan pemerintah menurut Fadzil dan Nyoto (2011) dalam (Nurdin 2015) misalnya oportunistik dalam proses penganggaran yaitu memasukkan program yang berorientasi kepada publik tetapi sebenarnya masih mengandung kepentingan pemerintah itu sendiri dan pemerintah dapat mengalokasikan biaya kampanye mereka ke dalam anggaran demi untuk membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik.

Tindakan tersebut merupakan sedikit contoh tindakan pemerintah yang dapat membuat masyarakat krisis kepercayaan kepada pemerintah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan melibatkan hasil kinerjanya yang sudah tercapai (Nurdin, 2015).

2.1.2 Teori Kontingensi (*Contingensi Theory*)

Teori kontingensi yang dikemukakan oleh Fiedler's (1964) ini menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi menekan terhadap gaya kepemimpinan dan pemahaman situasi yang tepat oleh pemimpin. Teori

kontingensi mengemukakan bahwa situasi dapat dikategorikan dengan tiga faktor; hubungan pemimpin bawahan, struktur kinerja dan kekuatan posisi. Hubungan pimpinan bawahan merujuk kepada atmosfer kelompok dan kepercayaan diri, kesetiaan dan interaksi mereka. Struktur kinerja lebih ditekankan kepada optimalisasi kinerja.

Beberapa pertimbangan kerja dapat dikatakan terstruktur bila:

1. Persyaratan kinerja/tugas itu harus jelas dan diketahui
2. Pola penyelesaian kerja mempunyai banyak alternatif
3. Penyelesaian kerja dapat diimplemetasikan dengan mudah
4. Hanya beberapa solusi yang berlaku

Kekuatan posisi adalah karakteristik ketiga yang merujuk kepada otoritas pemimpin untuk memberikan hadiah atau hukuman kepada bawahan. Kekuatan ini mencakup kekuatan legitimasi perorangan yang berujung kepada posisi mereka di organisasi. Secara umum, ketiga faktor situasional diatas menentukan berbagai situasi dalam organisasi. Situasi yang paling tepat untuk kesesuaian gaya kepemimpinan adalah hubungan pimpinan bawahan yang baik, kerja terstruktur dan posisi pemimpin yang kuat.

2.1.3 Definisi Akuntabilitas Kinerja

1. Pengertian Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999, yang mengamanatkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam suatu laporan pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan

kinerja di dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Menurut Yusrianti dan Rika (2015), Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang bisa dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Rahmadan (2014) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu laporan pertanggungjawaban untuk disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kebijakan untuk disusun oleh instansi pemerintah.

Keputusan Kepala LAN No.239/XI/6/8/2003 tentang penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan uraian mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ialah suatu laporan pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan kinerja dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, haruslah diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berkenaan dengan ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada presiden, adalah semua kegiatan instansi pemerintah yang memberi kontribusi bagi pencapaian visi dan misinya. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup :

- a. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Program kerja yang menjadi isu nasional.

- c. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.

3. Manfaat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pemberlakuan AKIP ini juga tidak lepas dari nilai kemanfaatan yang diharapkan, antara lain :

- a. Mempertajam penetapan prioritas program-program pembangunan nasional dan daerah.
- b. Meminimalisasi duplikasi pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan sekaligus dapat meningkatkan kinerja secara teratur dan berkelanjutan.
- c. Tersedianya mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya nasional dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan nasional dan daerah yang lebih akurat.
- d. Mempercepat dan meningkatkan keakurasian dalam penyusunan revisi, perhitungan APBN sesuai dengan amanat UU keuangan Negara.
- e. Mencegah penggunaan dana APBN/APBD untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- f. Tersedianya sarana dan metode kerja baru dalam pengendalian sistem manajemen (*built in control system*) yang lebih handal.
- g. Dapat mengurangi jenis dan jumlah laporan yang harus disiapkan pejabat di setiap instansi pemerintah, sehingga waktu kerja pemimpin dapat difokuskan untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

4. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

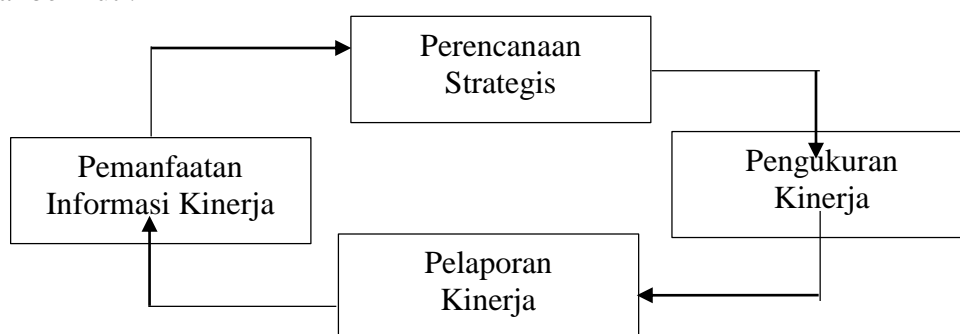
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap

sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategi
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan

sebagai berikut :



Sumber : Pusdiklatwas BPKP

Gambar 2.1

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar di atas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran strategik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya.

Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu.

Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran Perencanaan Strategis Pengukuran Kinerja Pemanfaatan Informasi Kinerja Pelaporan Kinerja kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.1.4 Definisi Anggaran Berbasis Kinerja

1. Definisi Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*) adalah “sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi”. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi. Dengan kata lain *performance budgeting* adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur yang diawali dengan pencapaian tujuan, program dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen (Bastian, 2010: 202).

Menurut Halim dan Kusufi (2014 : 55) [5] Anggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran dalam sektor publik yang disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan yang pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam pengambilan keputusan. Unsur-unsur pokok anggaran berbasis kinerja yang harus dipahami menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008 : 14-19) [2] unsur-unsur anggaran berbasis kinerja yaitu Pengukuran kinerja, Penghargaan dan Hukuman, Kontrak Kinerja, Kontrol Eksternal dan Internal, serta Pertanggungjawaban Manajemen.

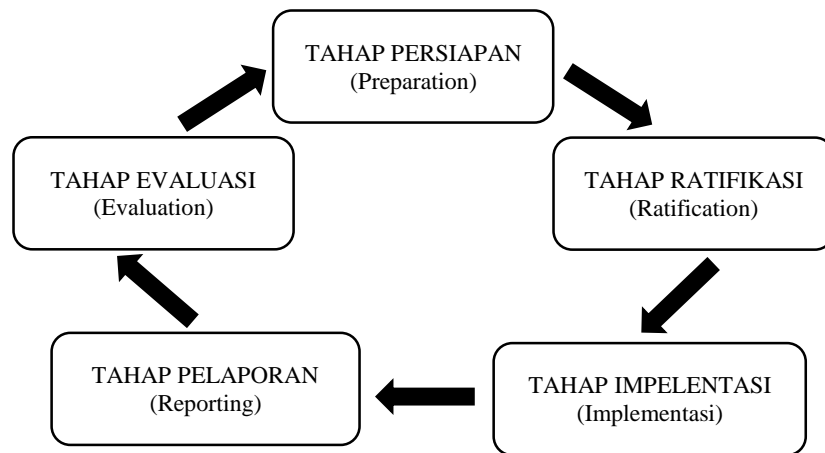
Sedangkan menurut Indra (2010: 202) mengemukakan anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan erat dengan visi, misi dalam mengalokasikan sumber daya ke program dengan menekankan konsep *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2011:70) menjelaskan siklus anggaran sektor publik melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan anggaran Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.
- b. Tahap ratifikasi Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
- c. Tahap pelaksanaan anggaran Dalam tahap ini yang paling penting adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.
- d. Tahap pelaporan dan evaluasi Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

Tahap- Tahap siklus Anggaran :



Gambar 2.2
Tahapan Siklus Anggaran

2. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Bastian (2010: 208) Secara umum, tujuan anggaran berbasis kinerja adalah :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *Bottom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja financial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat diterlurus perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

3. Keunggulan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Bastian (2010: 209) Keunggulan Anggaran Berbasis Kinerja,

meliputi :

- a. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan.
- b. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual.
- c. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan.
- d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada efisiensi unit kerja.
- e. Menghindarkan pemborosan.

4. Prinsip - Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Abdul (2007: 178) Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja antara lain:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

b. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya.

c. Keadilan Anggaran

Pemerintah pusat atau daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal.

e. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

2.1.5 Sistem Pelaporan

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik dan

melembaga. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Menurut (Paramitha dan Gayatri, 2016), mengemukakan sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut (Yuniarti, 2015), mengemukakan sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.

Paramitha dan Gayatri (2016), Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan di gunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Menurut Arifin W (2012), Laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, obyektif, dan transparan.

2.2 Peneliti Sebelumnya

Penelitian terdahulu dibuat untuk membandingkan hasil peneliti yang dilakukan sebelumnya sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya sama dengan variabel penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan dari peneliti ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang di laksanakan sebelumnya yaitu :

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Laura Wahdatul, Sri Rahayu, Vaya Juliana (2016)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung	$X_1 =$ Anggaran Berbasis Kinerja $X_2 =$ Sistem Pelaporan Keuangan $Y =$ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Deskriptif	hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan secara simultan maupun parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.
2	Ana Muchlisa Rezeqiah (2017)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	$X_1 =$ Anggaran Berbasis Kinerja $Y =$ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Asosiatif	Hasil menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kmerja instansi pemerintah.
3	Wahyuni, Raja adri satriawan surya, Enni Savitri	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian	$X_1 =$ kejelasan sasaran anggaran $X_2 =$ pengendalian	Deskriftif	Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas

	(2013)	akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten rokan hulu)	akuntansiAnggaran $X_3 =$ Sistem Pelaporan $Y =$ Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		kinerja instansi pemerintah Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4	Seto Wibisono (2016)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	$X_1 =$ Anggaran Berbasis Kinerja $Y =$ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Deskriptif	Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5	Haspiarti (2012)	Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	$X_1 =$ anggaran berbasis kinerja $Y =$ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Deskriptif	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sumber: Data Peneliti, 2020

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2013), kerangka konseptual merupakan dasar teori yang menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel variabel penelitian tentang bagaimana peraturan-peraturan teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel bebas

dan satu variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan yaitu, Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Sistem Pelaporan (X_2). Sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Pada uraian atau teori-teori dari latar belakang masalah diatas maka berikut kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indra (2010: 202) anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi. Menurut Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 dalam sistem AKIP berkaitan dengan pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja untuk mengetahui hasil capaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah.

Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian Komang (2014) jika suatu organisasi menerapkan anggaran berbasis kinerja yang kurang memadai, maka akan menimbulkan hambatan dan akhinya informasi akuntansi kualitasnya memburuk yang akan mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan. Dengan kurang memadainya penerapan anggaran berbasis kinerja, hal tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang kurang baik.

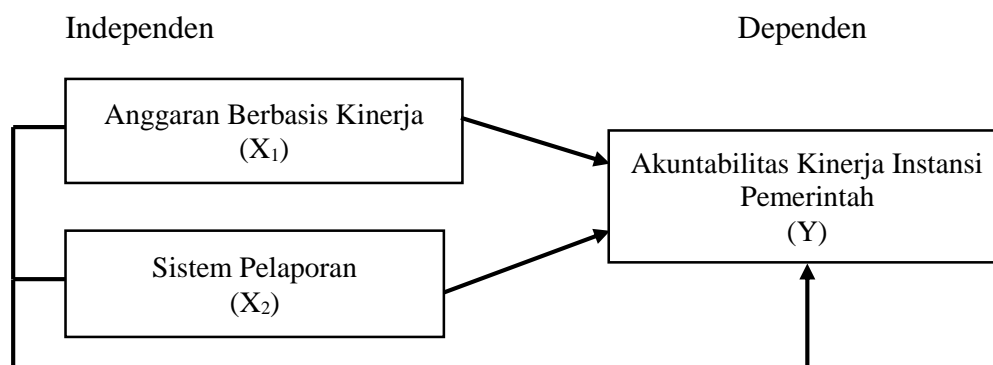
2. Hubungan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja pusat

pertanggungjawaban. Laporan harus menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Sistem pelaporan yang baik mempunyai andil besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan yang dibuat secara jujur, obyektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten merupakan *feedback* bagi pemakai untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan yang disusun dengan baik, secara tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap persepsi aparat pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Yaacob & Nahar (2011), Anjarwati (2012), Herawati (2012), serta Herdjiono (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3.



Sumber: Data Peneliti, 2020

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis dapat membuat hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan.
2. Terhadap pengaruh positif Sistem Pelaporan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan.
3. Terdapat pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan secara simultan pada Dinas Kesehatan Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2016), Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Medan yang berada di Jl. Rotan, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20111.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai Agustus 2020 sampai dengan selesai. Tabel skedul proses penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 *Schedule* Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Agst'20	Sep'20	Okt'20	Nov'20	Des'20	Jan'21	Feb'21	Mar'21
1	Riset awal/Pengajuan judul	■							
2	Penyusunan proposal		■						
3	Perbaikan/acc proposal			■					
4	Seminar proposal					■			
5	Pengolahan data						■		
6	Penyusunan skripsi						■		
7	Bimbingan Skripsi							■	
8	Sidang								■

Sumber :Diolah penulis, 2020

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu :

- a. Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat (Sugiyono,2016) . Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu adalah Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Sistem Pelaporan (X_2).
- b. Variabel Dependen (Variabel Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2016) . Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan serta bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel dari suatu faktor lainnya. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep dan teori definisi atau gabungan keduanya yang ada di lapangan.

Adapun definisi operasional penelitian ini adalah :

Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
	Anggaran Berbasis Kinerja (X ₁)	Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisas Menurut Bastian (2006: 171)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Kinerja 2. Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment) 3. Kontrak Kinerja 4. Kontrol Eksternal dan Internal 5. Pertanggungjawa ban Manajemen 	Likert
2	Sistem Pelaporan (X ₂)	Sistem Pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. (Abdullah 2005 dalam Wahyuni 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan yang dibuat sesuai dengan SAP. 2. Menerbitkan laporan keuangan Pemda dan laporan Perusahaa 	Likert
3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (X ₃)	Dalam Konteks organisasi pemerintah, Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Mardiasmo, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perencanaan 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Pemanfaatan Informasi Kinerja bagi Perbaikan Kinerja secara Berkesinambungan 	Likert

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, yang diambil sebagai sumber data untuk mewakili seluruh populasi. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan metode *random sampling*. Adapun responden dalam penelitian ini para pegawai yang melaksanakan Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan Akuntansi di Dinas Kesehatan Kota Medan. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 33 orang.

3.5 Jenis dan Sumber data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui pemberian angket atau kuisioner kepada pegawai yang melaksanakan Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan Akuntansi di Dinas Kesehatan Kota Medan.

3.6 Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket (kuisioner). Menurut Sugiyono (2016) Angket (kuisioner) merupakan teknik pengumpulan data dimana responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap dikembalikan kepada peneliti. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2016), skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert terdiri 5 (lima) angka yakni mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

Perinciannya adalah :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.7 Teknik Analisis Data

Untuk mendeskripsikan hasil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan dalam mengolah data penelitian dilakukan beberapa pengujian seperti uji kualitas data dan uji asumsi klasik serta menggunakan program pengolahan data statistik yaitu program SPSS Versi 16.

1. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, Menurut Ghozali (2013).

Untuk itu dapat dikemukakan bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur maupun mengukur apa yang diukur.

Menurut Ghozali (2013) “Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} , dengan membandingkan nilai r_{hitung} dari hasil output (*Corrected Item Total Correlation*) dengan r_{tabel} . Total correlation dengan kriteria sebagai berikut: jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilainya positif, maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika $r_{hitung} < r_{tabel}$

maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013) Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk". Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, Menurut Ghozali (2013). Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika $\alpha > 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika $\alpha < 0,60$.

2. Uji Asumsi Data/Asumsi Klasik

Untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak.

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model ini regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal, Menurut Ghozali (2013). Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Selain menggunakan metode *kolmogorov smirnov*, untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini dapat menggunakan grafik histogram dan *probability plot*.

Menurut Ghozali (2011) grafik histogram digunakan untuk

membandingkan antara data dan observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, data dikatakan berdistribusi normal, apabila grafik histogram memiliki garis berbentuk lonceng yang berkesinambungan. Kemudian *probability plot* digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dan distribusi normal, data dikatakan berdistribusi normal, apabila titik-titik data menyebar berada disekitar garis diagonal .

b. Uji Multikolineritas

Menurut Ghozali (2013), “Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas menyatakan hubungan antara sesama variabel independen. Asumsi multikolineritas menyatakan hubungan antara sesama variabel independen. Asumsi multikolonieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Ghozali (2013), “Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu (1) nilai Tolerance dan (2) VIF (*Variance Inflation Factors*). Jika, nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolonieritas dan jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas”.

c. Uji Heteroskedastisitas

“Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”, Menurut Ghozali (2013), dapat dikatakan data berdistribusi normal apabila data menyebar secara acak dan tidak membentuk

suatu pola atau garis tertentu. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada gambar *scatterplot*.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*). Untuk membuktikan hipotesis digunakan alat uji statistik regresi linier berganda, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
a	: Konstanta
b_1	: Koefisien Regresi Variabel Anggaran Berbasis Kinerja
X_1	: Anggaran Berbasis Kinerja
b_2	: Koefisien Regresi Variabel Sistem Pelaporan
e	: Error

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. “Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen”, Menurut Ghozali (2013). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan:

1. Jika, $sig > \sigma 0.05$, maka H_0 ditolak, dan
2. Jika, $sig < \sigma 0.05$, maka H_0 diterima.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan F-test. “Uji statistik

F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat”, Menurut Ghozali (2013). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F_{hitung} dengan ketentuan:

1. Jika $sig < \sigma 0.05$, maka H_1 ditolak, dan
2. Jika $sig > \sigma 0.05$, maka H_1 diterima.

4. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013) “menyatakan Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui *adjusted*. *Adjusted* ini digunakan karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang diperoleh $> 0,5$, maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi. Semakin besar angka *Adjusted* maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika *Adjusted* semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen (Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan) terhadap variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yaitu dengan mengkuadratkan koefisien korelasi .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat di bidang Kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan atau yang biasa disingkat DKK Medan terletak di Jalan Rotan No. 1 Komplek Petisah Medan. Dinas ini membawahi 39 Puskesmas Induk (13 Puskesmas Rawat Inap dan 26 Puskesmas Rawat Jalan) dan 41 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang terletak di 21 Kecamatan se Kota Medan. Disamping itu DKK Medan mempunyai Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu Gudang Farmasi yang terletak di Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang terletak di Jalan Ibus Raya dan Klinik Spesialis Bestari yang juga terletak di Jalan Ibus Raya Medan.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Medan :

1. Visi Dinas Kesehatan Kota Medan

Visi Dinas Kesehatan Kota Medan yaitu **“Menjadi Kota Yang Sehat
Dalam Kemandirian Dan Humanis”**.

2. Misi Dinas Kesehatan Kota Medan :

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna, merata dan bermutu.
- b. Menumbuhkembangkan kemandirian dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan.
- c. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan.
- d. Meningkatkan manajemen dan informasi kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna.

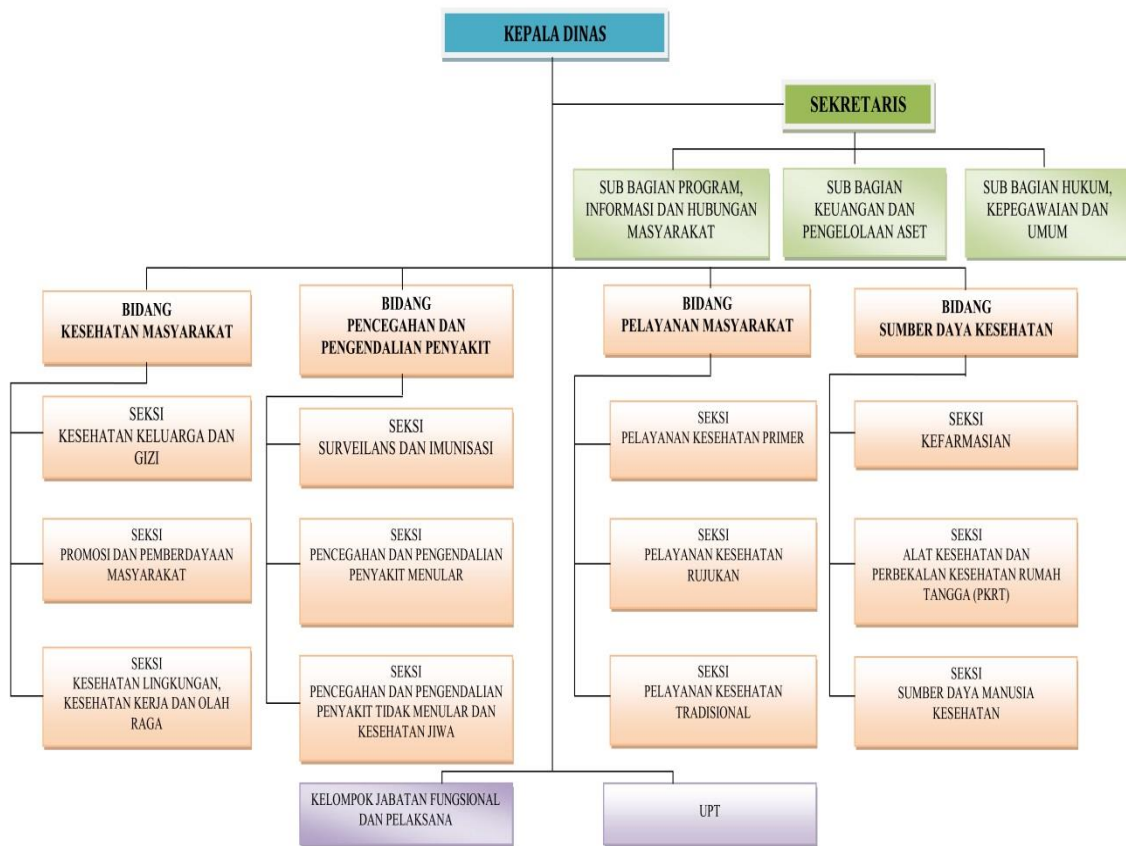
3. Fungsi Dinas Kesehatan yaitu :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
- b. penyelenggaraan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
- c. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan upaya- upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;

- d. penyelenggaraan administrasi upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
- e. penyelenggaraan fun/gsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.1.2 Gambaran Umum Responden

4.1.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi Karakteristik responden penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Medan dan Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari kuisioner yang dibagikan kepada responden berjumlah 33 responden pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020.

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada Dinas Kesehatan Kota Medan. Seluruh kuisioner berjumlah 33 yang di bagikan kepada responden. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian. Pada tabel 4.1 diuraikan mengenai tingkat pengambilan kuisioner.

Tabel 4.1 Tingkat Pengambilan Kuisioner

No	Dinas	Sebar	Kembali		Tidak Kembali	Total
			Baik	Rusak		
1	Dinas Kesehatan	33	33	0	0	33

Sumber : Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, masa kerja, jabatan, golongan, dan pengalaman diklat.

Tabel 4.2 Jenis kelamin Responden

No	Umur	Frekuensi	Presentasi (%)
1	20-29 Tahun	8	24,2%
2	30-39 Tahun	25	75,8%
	Jumlah	33	100,0%

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan, hal ini dapat dilihat bahwa ada 25 responden berjenis kelamin perempuan atau 75,8%, sedangkan responden berjenis kelamin laki laki adalah 8 responden atau 24,2%.

Tabel 4.3 Umur Responden

No	Umur	Frekuensi	Presentasi (%)
1	20-29 Tahun	0	0
2	30-39 Tahun	18	54,5%
3	40-49 Tahun	12	36,4%
4	50-59 Tahun	3	9,1%
	Jumlah	33	100,0 %

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan umur responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan umur 30-39 tahun yaitu 18 responden atau 54,5%, umur 40-49 tahun 12 responden atau 36,4%, dan responden terkecil dengan umur 50-59 tahun yaitu 3 responden atau 9,1%.

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentasi (%)
1	SMA	2	6,1%
2	SMK	0	0
3	Diploma	4	12,1%
4	S1	21	63,6%
5	S2	5	15,2%
6	S3	1	3,0%
	Jumlah	33	100,0 %

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) yaitu 21 responden atau 63,6%, dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) yaitu 5 responden atau 15,2%, pendidikan terakhir Diploma yaitu 4 responden atau 12,1%, pendidikan terakhir SMA yaitu 2 responden atau 6,1%, dan pendidikan terakhir Doktor (S3) yaitu 1 responden atau 3,0%.

Tabel 4.5 Masa Kerja Responden

No	Masa Kerja	Frekuensi	Presentasi (%)
1	<5 Tahun	0	0
2	5 s/d 10 Tahun	11	33,3%
3	>10 Tahun	22	66,7%
	Jumlah	33	100,0 %

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan masa kerja responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu 22 responden atau 66,7%, dan masa kerja 5 s/d 10 Tahun yaitu 11 responden atau 33,3%.

Tabel 4.6 Jabatan Responden

No	Jabatan	Frekuensi	Presentasi (%)
1	Kasubag	2	6,1%
2	staff Keuangan	12	36,4%
3	staff Program	10	30,3%
4	Staff Aset	9	27,3%
	Jumlah	33	100,0 %

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jabatan responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jabatan

Staff Keuangan yaitu 12 responden atau 36,4%, jabatan Staff Program yaitu 10 responden atau 30,3%, jabatan Staff Aset yaitu 9 responden atau 27,3%, dan jabatan Kasubag keuangan yaitu 2 responden atau 6,1%.

Tabel 4.7 Golongan Responden

No	Jabatan	Frekuensi	Presentasi (%)
1	Golongan IV	0	0
2	Golongan III	28	84,8%
3	Golongan II	4	12,1%
4	Lainnya	1	3,0%
	Jumlah	30	100,0 %

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jabatan responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan golongan III yaitu 28 responden atau 84,8%, golongan II yaitu 4 responden atau 12,1%, dan lainnya yaitu 1 responden atau 3,0%.

Tabel 4.8 Pengalaman Diklat

No	Jabatan	Frekuensi	Presentasi (%)
1	0-5 Kali	22	66,7%
2	5-10 Kali	7	21,2%
3	>10 Kali	4	12,1%
4	Lainnya	0	0
	Jumlah	33	100,0 %

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan pengalaman diklat responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan pengalaman diklat 0 s/d 5 kali yaitu 22 responden atau 66,7%,

pengalaman diklat 5 s/d 10 kali yaitu 7 responden atau 21,2%, dan pengalaman diklat lebih dari 10 kali yaitu 4 responden atau 12,1%.

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki 3 buah variabel yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan, dan memiliki satu variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyebaran kuisioner, masing-masing memiliki 6 butir pernyataan X_1 , 5 butir pernyataan X_2 dan 6 butir pernyataan di variabel Y, yang akan diisi oleh 33 responden. Skala yang digunakan pada penelitian ini ialah skala likert.

a. Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)

Tabel 4.9 Penilaian Responden Terhadap Variabel X_1

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	5	15,2	25	75,8	3	9,1	0	0	0	0	33	100
P2	3	9,1	23	69,7	7	21,2	0	0	0	0	33	100
P3	5	15,2	21	63,6	5	15,2	2	6,1	0	0	33	100
P4	4	12,1	23	69,7	6	18,2	0	0	0	0	33	100
P5	4	12,1	23	69,7	6	18,2	0	0	0	0	33	100
P6	2	6,1	22	66,7	7	21,2	2	6,1	0	0	33	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dari 33 responden sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 1, sebanyak 25 responden (75,8%) menyatakan

setuju pada pernyataan 1, dan sebanyak 3 responden (9,1%) menyatakan netral pada pernyataan 1.

- 2) Dari 33 responden sebanyak 3 responden (9,1%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 2, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 2, sebanyak 7 responden (21,2%) menyatakan netral pada pernyataan 2.
- 3) Dari 33 responden sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 3, sebanyak 21 responden (63,6%) menyatakan setuju pada pernyataan 3, sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan netral pada pernyataan 3, dan sebanyak 2 responden (6,1%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 3.
- 4) Dari 33 responden sebanyak 4 responden (12,1%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 4, sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan netral pada pernyataan 4.
- 5) Dari 33 responden sebanyak 4 responden (12,1%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 5, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan netral pada pernyataan 5.
- 6) Dari 33 responden sebanyak 2 responden (6,1%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 6, sebanyak 22 responden (66,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 6, sebanyak 7 responden (21,2%) menyatakan netral pada pernyataan 6, dan sebanyak 2 responden (6,1%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 6.

b. Variabel Sistem Pelaporan (X_2)Tabel 4.10 Penilaian Responden Terhadap Variabel X_2

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	7	21,2	20	60,6	5	15,2	1	3,0	0	0	33	100
P2	6	18,2	19	57,6	8	24,2	0	0	0	0	33	100
P3	9	27,3	15	45,5	8	24,2	1	3,0	0	0	33	100
P4	13	39,4	12	36,4	8	24,2	0	0	0	0	33	100
P5	3	9,1	23	69,7	7	21,2	0	0	0	0	33	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dari 33 responden sebanyak 7 responden (21,2%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 1, sebanyak 20 responden (60,6%) menyatakan setuju pada pernyataan 1, sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan netral pada pernyataan 1, dan sebanyak 1 responden (3,0%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 1.
- 2) Dari 33 responden sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 2, sebanyak 19 responden (57,6%) menyatakan setuju pada pernyataan 2, sebanyak 8 responden (24,2%) menyatakan netral pada pernyataan 2.
- 3) Dari 33 responden sebanyak 9 responden (27,3%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 3, sebanyak 15 responden (45,5%) menyatakan setuju pada pernyataan 3, sebanyak 8 responden (24,2%) menyatakan netral pada pernyataan 3, dan sebanyak 1 responden (3,0%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 3.

- 4) Dari 33 responden sebanyak 13 responden (39,4%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 12 responden (36,4%) menyatakan setuju pada pernyataan 4, sebanyak 8 responden (24,2%) menyatakan netral pada pernyataan 4.
- 5) Dari 33 responden sebanyak 3 responden (9,1%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 5, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 7 responden (21,2%) menyatakan netral pada pernyataan 5.

c. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Tabel 4.11 Penilaian Responden Terhadap Variabel Y

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	3	9,1	23	69,7	6	18,2	1	3,0	0	0	33	100
P2	3	9,1	26	78,8	4	12,1	0	0	0	0	33	100
P3	5	15,2	22	66,7	6	18,2	0	0	0	0	33	100
P4	2	6,1	25	75,8	5	15,2	1	3,0	0	0	33	100
P5	4	12,1	23	69,7	6	18,2	0	0	0	0	33	100
P6	6	18,2	19	57,6	8	24,2	0	0	0	0	33	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dari 33 responden sebanyak 3 responden (9,1%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 1, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 1, sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan netral pada pernyataan 1, dan sebanyak 1 responden (3,0%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 1.

- 2) Dari 33 responden sebanyak 3 responden (9,1%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 2, sebanyak 26 responden (78,8%) menyatakan setuju pada pernyataan 2, sebanyak 4 responden (12,1%) menyatakan netral pada pernyataan 2.
- 3) Dari 33 responden sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 3, sebanyak 22 responden (66,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 3, dan sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan netral pada pernyataan 3.
- 4) Dari 33 responden sebanyak 2 responden (6,1%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 25 responden (75,8%) menyatakan setuju pada pernyataan 4, sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan netral pada pernyataan 4, dan sebanyak 1 responden (3,0%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 4.
- 5) Dari 33 responden sebanyak 4 responden (13,3%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 5, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan netral pada pernyataan 5.
- 6) Dari 33 responden sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 6, sebanyak 19 responden (57,6%) menyatakan setuju pada pernyataan 6, dan sebanyak 8 responden (24,2%) menyatakan netral pada pernyataan 6.

4.1.4 Uji Instrumen Data

4.1.4.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan ukuran yang menunjukkan keabsahan atau

kesahihan dari suatu instrument penelitian. Instrument penelitian yang valid mampu mengukur apa yang diinginkan dan mampu mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tetap. Cara mengukurnya adalah dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan syarat $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dalam penelitian ini uji validitas diukur dengan 33 responden menggunakan uji validitas. Syarat minimum untuk dianggap valid adalah nilai indeks validnya $> 0,30$. Rusiadi (2015:113). Maka dari itu, semua pertanyaan yang memiliki tingkat korelasi dibawah 0.3 harus diperbaiki karena dianggap tidak valid.

Tabel.4.12 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)	Butir 1	0,682	0,30	Valid
	Butir 2	0,607	0,30	Valid
	Butir 3	0,572	0,30	Valid
	Butir 4	0,573	0,30	Valid
	Butir 5	0,381	0,30	Valid
	Butir 6	0,630	0,30	Valid
Sistem Pelaporan (X_2)	Butir 1	0,581	0,30	Valid
	Butir 2	0,642	0,30	Valid
	Butir 3	0,646	0,30	Valid
	Butir 4	0,646	0,30	Valid
	Butir 5	0,617	0,30	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Butir 1	0,615	0,30	Valid
	Butir 2	0,589	0,30	Valid
	Butir 3	0,660	0,30	Valid
	Butir 4	0,549	0,30	Valid

	Butir 5	0,737	0,30	Valid
	Butir 6	0,717	0,30	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, pada tabel 4.12 maka dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan pada variabel X_1 , X_2 , dan Y dikatakan valid. Hal ini dapat dinilai dari r -hitung masing-masing butir pernyataan lebih besar daripada nilai r -tabel.

4.1.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila diukur beberapa kali dengan alat ukur yang sama, Rusiadi (2015:107). Cara mengukurnya adalah dengan menghitung koefisien reliabilitas dengan membandingkan dengan *Cronbach's alpha* yang bernilai 0,6. Jika lebih besar dari 0,6 maka *reliable* tetapi jika lebih kecil dari 0,6 maka tidak *reliable*.

Tabel.4.13 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)	0,709	<i>Reliable</i> / Konsisten
Sistem Pelaporan (X_2)	0,745	<i>Reliable</i> / Konsisten
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,758	<i>Reliable</i> / Konsisten

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.13 maka dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan pada variabel X_1 , X_2 , dan Y dikatakan *reliable*,

handal atau konsisten. Hal ini dapat dinilai dari *Cronbach's Alpha* masing-masing butir pernyataan pada tiap variabel lebih besar dari 0,6.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, maka sebagai persyaratan perlu dilakukan uji untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu model regresi. Uji asumsi klasik yang harus dilakukan adalah data berdistribusi normal, tidak terjadinya heterokedastitas dan tidak adanya multikolinieritas.

4.1.5.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, sehingga data tersebut dapat digunakan dalam model regresi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara pengujian normalitas melalui analisis grafik dan analisis statistik.

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan analisis grafik yaitu melihat grafik histogram dan grafik *normal probability plot*. Normalitas dapat diketahui dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik maupun dari hasil histogram residualnya. Berikut ini adalah kriteria normalitas analisis grafik :

- a) Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

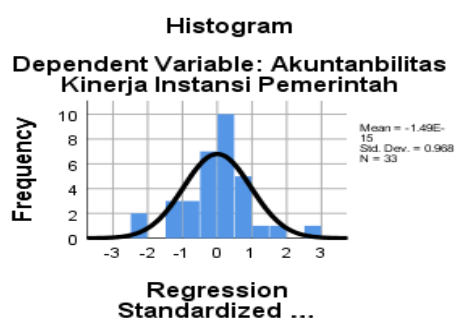
- b) Apabila data menyebar dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.14 Uji Normalitas *Kolmogrov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.42414413
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.105
	Positive	.102
	Negative	-.105
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat angka *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

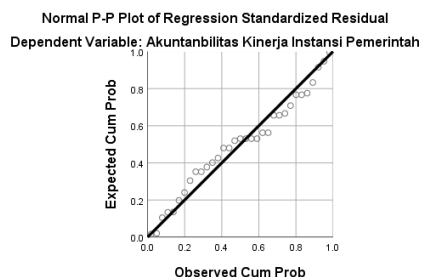


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Gambar 4.2 Histogram

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat hasil pengolahan data uji normalitas diketahui bahwa data berdistribusi secara normal, dimana gambar

histogram memiliki garis berbentuk lonceng yang berkesesinambungan.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26

Gambar 4.3 Normal P.P Plot

Berdasarkan gambar diatas, untuk hasil pengujian normalitas dengan menggunakan gambar Normal P.P Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada disekitar garis diagonal sehingga data telah terdistribusi secara normal.

4.1.5.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau VIF < 10. Maka disimpulkan ini terjadi multikolineritas. Uji multikolineritas dari hasil kuisioner yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel 4.15

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolineritas

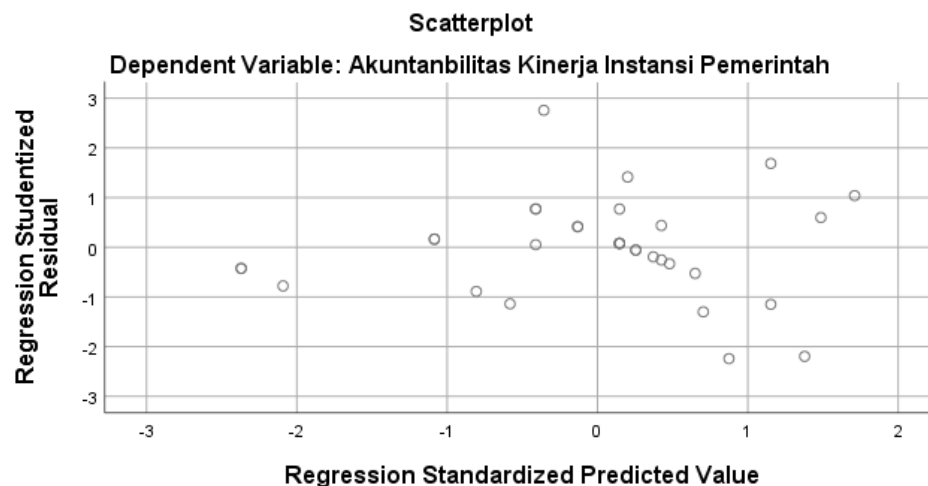
Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	5.022	2.999		1.674	.104		
	Anggaran Berbasis Kinerja (X ₁)	.386	.185	.354	2.094	.045	.474	2.110
	Sistem Pelaporan (X ₂)	.480	.171	.474	2.802	.009	.474	2.110

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dilihat angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah anggaran berbasis kinerja $2,110 < 10$, dan sistem pelaporan $2,110 < 10$, dan nilai *tolerance* anggaran berbasis kinerja $0,474 > 0,010$, dan sistem pelaporan $0,474 > 0,010$, sehingga terlepas dari multikolinieritas.

4.1.5.3 Uji Heterokedasitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians residual* dari suatu pengamatan. Dikatakan berdistribusi normal apabila data menyebar dan tidak membentuk suatu pola. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot*. Hasil pengujian heterokedasitas dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Gambar 4.4 Uji Heterokedasitas

4.1.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Anggaran Berbasis Kinerja (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

β_2 = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = Anggaran Berbasis Kinerja

X_2 = Sistem Pelaporan

ϵ = *Error* (nilai residual)

Berdasarkan pengujian menggunakan *software statistic*, maka hasil

persamaan regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.022	2.999		1.674	.104		
	Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)	.386	.185	.354	2.094	.045	.474	2.110
	Sistem Pelaporan (X_2)	.480	.171	.474	2.802	.009	.474	2.110

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

$$Y = 5,022 + 0,386 + 0,480 + \epsilon$$

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa apabila seluruh variabel independen (X_1, X_2) dianggap konstan maka nilai employee (kinerja) (Y) adalah sebesar 5,022 dengan e (*standart error*) 2,999 dan berubah. Dapat dilihat juga bahwa nilai koefisien regresi Sistem Pelaporan sebesar 0,480 lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien regresi Anggaran Berbasis Kinerja sebesar

0,386. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel Sistem Pelaporan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibandingkan dengan variabel Anggaran Berbasis Kinerja.

4.1.7 Uji Hipotesis

4.1.7.1 Uji Signikan Parsial (Uji t)

Uji signifikan parsial (uji-t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011:84) :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Cara menentukan t_{tabel} dengan melihat pada $\alpha = 5\%$ yang diperoleh dari *degree of freedom* dengan rumus :

$$df = n - k$$

Keterangan :

Df = degree of freedom (derajat)

N = jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 33

K = jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu 3

Sehingga t_{tabel} dengan sampel 33, probabilitas 5% dan df sebesar 30 adalah 1,6973. Berikut adalah tabel uji t dari *statistic software*.

Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.022	2.999		1.674	.104
Anggaran Berbasis Kinerja	.386	.185	.354	2.094	.045
Sistem Pelaporan	.480	.171	.474	2.802	.009

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui nilai t_{hitung} dari setiap variabel :

- a) Variabel Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} (2,094) > t_{tabel} (1,69) dan nilai signifikan (0,045) < 0,05. maka hipotesis (H_1) diterima. Artinya variabel Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Variabel Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} (2,802) > t_{tabel} (1,69) dan nilai signifikan (0,009) < 0,05. Maka hipotesis (H_2) diterima. Artinya variabel Sistem Pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1.7.2 Uji Signikan Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (uji f) digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen secara bersama-sama dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan tingkat $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011:84) adalah :

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau angka probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau angka probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Cara menentukan F_{tabel} dengan melihat pada $\alpha = 5\%$, yang diperoleh dari *degree of freedom* untuk pembilang dan *degree of freedom* untuk penyebut dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Df pembilang} &= k - 1 \\ &= 3 - 1 \\ \text{Df penyebut} &= n - k - 1 \\ &= 33 - 3 - 1 \\ \text{Keterangan :} \\ \text{Df} &= \textit{degree of freedom} \text{ (derajat)} \end{aligned}$$

N = jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 33

K = jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu 3

Sehingga F_{tabel} dengan sampel 33, probabilitas 5% dan df pembilang 2, df penyebut 29 adalah 3,33

Tabel 4.18 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	94.734	2	47.367	21.895	.000 ^b
	Residual	64.902	30	2.163		
	Total	159.636	32			

a. Dependent Variable: AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerinta

b. Predictors: (Constant), SistemPelaporan, AnggaranBerkasKinerja

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= \text{Mean square regression} / \text{Mean square residual} \\ &= 47,367 / 2,163 = 21,895 \end{aligned}$$

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari tabel 4.14 di atas, bahwa nilai F_{hitung}

$(21,895) > F_{\text{tabel}} (3,33)$ dan nilai signifikan $(0,000) < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Anggaran Berbasis Kinerja (X_1), dan Sistem Pelaporan (X_2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen kinerja karyawan (Y).

4.1.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependent. Tujuan analisis ini adalah untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independent secara simultan terhadap variabel dependent. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel independent. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel independent.

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	.593	.566	1.471

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Anggaran Berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa angka *adjusted R Square* 0,593 yang disebut koefisien determinasi berarti 59,3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diperoleh dan dijelaskan oleh sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi. Sedangkan sisanya $100\% - 59,3\% = 40,7$ dijelaskan oleh faktor lain .

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan

Berdasarkan Penelitian ini, maka didapat hasil penelitian yaitu Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Jika suatu instansi menerapkan anggaran berbasis kinerja yang memadai maka terciptanya informasi akuntansi yang kualitasnya baik yang akan mempengaruhi ketepatan dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Suriani (2014) bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

2. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Dengan Adanya sistem pelaporan akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk terwujudnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yulianti (2014) bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

3. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Suriani (2014) bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung dan Yulianti (2014) bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Penelitian ini berjumlah 33 responden. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan.
2. Terdapat pengaruh positif antara Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan.
3. Terdapat pengaruh secara Simultan antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kota Medan, diharapkan untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan pelaksanaan dengan menerapkan prinsip-prinsip

Anggaran Berbasis Kinerja untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut serta mengoptimalkan pengawasan terhadap input, output dan outcome atas pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan seluruh potensi sumber daya yang ada berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya dapat berjalan dengan baik dan lebih meningkatkan Sistem Pelaporan terutama dalam hal pelaporan seperti membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas, dan laporan keuangan yang dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan lebih baik lagi agar dapat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.

2. Untuk peneliti selanjutnya :
 - a. Menambah variabel lain yang belum dimasukkan di penelitian ini terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung atau memperoleh data yang berkualitas.
 - c. Memperluas daerah observasi, atau menggunakan sampel yang berbeda dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian lebih akurat .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afrina, Dina. (2015). “*Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*”. *Jurnal Jom Fekon* Volume 2 Nomor 2, Oktober 2015 .
- Arifin W, Beny. (2012). “*Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Dimoderasi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*”. Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol. 13 No. 1, Halaman: 15-27, Januari 2012.
- Arnita, V., Nasution, N. A., & Murnihati, M. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Tbk. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 4(1), 512-517.
- Anjarwati, M. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- Cantika, Yulia. (2018). “*Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar*”.
- Cherrya, Rika, Gita Soraya. (2014). “*Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan*”. Palembang.
- Enni Savitri , Wahyuni, Raja Adri Satriawan Surya. (2013). “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)*”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.

- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For Specific Purpose (Esp) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Fathia, Nurul. (2017). *“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Skpd Di Provinsi Riau)”*. Jom Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Fatmala, Juanita. (2014). *“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Skpd Kabupaten Bengkulu Tengah)”*.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program Ibm Spss*. Edisi 7. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare*. Skripsi. Universitas Jambi. Makassar.
- Herawati, N. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 13(2).
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). Unpab Lecturer Assessment And Performance Model Based On Indonesia Science And Technology Index. In *Journal Of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, P. 012268). Iop Publishing.
- Kusumaningrum, Indraswari. (2010). *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”*.
- Mardiasmo. 2009. *“Akuntansi Sektor Publik”*, Andi: Yogyakarta.
- Muchlisa Rezeqiah, Ana. (2017). *“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Percencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”*.
- Nand, Reza. Darwanis. (2016). *“Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan)”*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 1, No. 1, (2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Anggaran Berbasis Kinerja*.

Paramitha, Gayatri. (2016). "*Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja*". Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016).

Ramadhan, Arief Rizki . (2014). "*Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Good Governance (Studi Di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)*". Malang.

Rika Henda Safitri, Hasni Yusrianti. (2015). "*Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang*". Palembang . Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 No.4 Desember 2015.

Rusiadi, Et Al (2015). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan Konsep, Kasus, Dan Aplikasi Spss, Eviews, Amos, Lisrel*. Cetakan Kedua. Medan: Usu Press.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif & Rnd*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif & Rnd*. Bandung: Alfabeta.

Setiawan, Eko. (2013). "*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi* ".

Wahdatul, Laura. Rahayu, Sri. Juliana. Dillak, Vaya. (2016). "*Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung* ". Jurnal E-Proceeding Of Management Vol.3, No.2 Agustus 2016 / Page 1560 .

Wibisono, Seto. (2016). "*Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*". Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 9, September 2016.

Yaacob, H., & Nahar, H. S., 2011. *Accountability In The Sacred Context: The Case Of Management, Accounting And Reporting For Malaysian Cash Awqaf Institution*. Business: Accounting, Finance, Management & Marketing, 19.

<https://sumut.bpk.go.id/>
<http://www.bpkp.go.id>
<https://pemekomedan.go.id>